

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan manusia. Semakin berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia semakin beragam. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, berbagai jenis usaha diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya dengan usaha koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha di Indonesia yang beranggotakan orang perseorangan yang melandaskan kegiatannya dengan prinsip kekeluargaan dan menjadi penopang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat, diharapkan mampu berperan aktif dalam mengembangkan berbagai usaha yang memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia (Annisa, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun (2023), koperasi memiliki peran yang strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi, dimana pada 31 Desember 2021 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 127,124 unit dengan jumlah anggota 27,10 juta orang. Meskipun partisipasi masyarakat Indonesia terhadap keberadaan koperasi masih tertinggal 8,41 persen dengan rata-rata dunia 16,31 persen. Terlepas dari fakta bahwa kontribusi koperasi terhadap peningkatan ekonomi saat ini masih kecil jika dibanding dengan sektor lain, namun koperasi akan terus didorong dan dioptimalkan lebih jauh agar memberikan pengaruh baik dan menjadi badan koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Sutrisno, 2022).

Dalam pengelolaan suatu usaha, laporan pertanggungjawaban menjadi suatu kewajiban yang menjadi tugas dari entitas (Probowulan dkk., 2021). Annisa (2022) mengatakan bahwa seperti halnya badan usaha lainnya, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi koperasi perlu menyusun sebuah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi terhadap kondisi dan situasi keuangannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola koperasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil kinerja koperasi selama jangka waktu tertentu. Prasetiawan (2015) juga berpendapat bahwa salah satu bentuk pengelolaan koperasi secara profesional adalah dengan menerapkan standar akuntansi keuangan.

Jika standar pelaporan keuangan tidak diterapkan dengan benar dan tidak terstruktur dalam penyusunan laporan keuangan, koperasi di Indonesia akan sulit mendapatkan pembiayaan atau dukungan modal baik dari pemerintah, mitra kerja, atau perbankan. Penyebab utama berbagai pihak tersebut sulit memberikan bantuan adalah tidak adanya informasi data keuangan yang digunakan untuk menilai apakah entitas tersebut mengalami kemajuan atau tidak. Oleh karena itu, entitas koperasi secara implisit diwajibkan menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar, akan memberikan dampak positif bagi para penggunanya. Sebaliknya jika tidak disusun berdasarkan standar keuangan akan berdampak negatif dan mempengaruhi perkembangan entitas (Azaria, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia (2023), menyatakan bahwa standar atau pedoman akuntansi keuangan di Indonesia terdiri dari lima pilar diantaranya Standar Akuntansi Keuangan (SAK),

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Awalnya, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan PSAK Nomor 27 sebagai Standar Akuntansi Koperasi. Namun, pada tanggal 8 April 2011, dewan IAI mengeluarkan PPSAK Nomor 8 atas pencabutan terhadap PSAK Nomor 27. Pencabutan tersebut didasari dari adanya pengaruh konvergensi IFRS (Standar Akuntansi Internasional) karena sudah diatur dalam SAK lain. Sebagai penggantinya, mulai 1 Januari 2011 hingga saat ini, DSAK IAI menerbitkan SAK ETAP yang ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum (IAI, 2023).

Sesuai surat edaran Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (2015) Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Akuntansi Koperasi, seluruh koperasi di Indonesia diarahkan untuk menjadikan SAK ETAP sebagai standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi, mengingat sejauh ini koperasi termasuk ke dalam entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Alasan koperasi diwajibkan menerapkan SAK ETAP karena dianggap lebih ringkas yang dapat memudahkan para pelaku koperasi dalam menyusun laporan keuangan secara efektif serta dapat mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan dan rencana kerja kedepannya (Hertiyo & Hisamuddin, 2016). Laporan keuangan suatu koperasi dapat dikatakan lengkap berbasis SAK ETAP dalam penyusunan dan penyajiannya apabila mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CALK (SAK ETAP, 2009).

Sebagai pengganti SAK ETAP, DSAK IAI juga mengesahkan standar lain yang bisa diterapkan oleh entitas yang akuntabelnya tidak dipublikasikan. Standar tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Pruvat (SAK EP) yang diterbitkan pada 30 Juni 2021 dan akan mulai berlaku pada tahun 2025. Namun, dalam penerapannya sudah diperbolehkan lebih awal. Dengan disahkannya standar tersebut, maka entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP akan digantikan oleh SAK EP dengan alasan karena SAK ETAP terlalu sederhana untuk entitas privat, sedangkan SAK EP lebih lengkap dibandingkan SAK ETAP. Dengan perubahan standar baru ini, tentu akan berdampak dalam isi laporan keuangan. Sehingga banyak sekali yang perlu disesuaikan oleh setiap entitas. Apabila suatu entitas masih ingin menerapkan SAK ETAP pada masa kini masih diperkenankan, dengan syarat hingga tahun 2025 harus diganti dengan SAK EP (IAI, 2023).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan kajian terhadap penyusunan pelaporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP. Seperti pada hasil penelitian Ikhsan (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pos-pos dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar, artinya penyusunan laporan keuangan KSP Berkat Cabang Pinrang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Kusuma (2021) menunjukkan bahwasanya penyusunan pelaporan keuangan Koperasi Serba Usaha Wiyapaka belum sepenuhnya sesuai dengan standar, masih perlu penyempurnaan terutama dalam penyajiannya. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan penelitian serupa terkait penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP, namun obyek yang berbeda.

Koperasi sekolah ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa dan guru sekolah di lingkungan sekolah. Koperasi sekolah didirikan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari koperasi SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah sebagai sarana pembelajaran bagi siswa untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Mendirikan koperasi sekolah tidak hanya dapat menjadi media belajar saja, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan sekolah (Alam S., 2013). Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Sejahtera adalah salah satu koperasi sekolah yang dibangun di lingkungan sekolah menengah pertama di SMPIT Al Qhozali Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Koperasi ini berdiri selama kurang lebih delapan tahun dan pada Desember 2015 telah resmi berbadan hukum. Koperasi ini bergerak di berbagai bidang usaha diantaranya usaha Minimarket, Depo Air Minum, Laundry, Catering, dan Investasi. Dikarenakan sifat koperasi ini untuk mensejahterakan para anggota di sekolah, maka diterapkan sistem simpan pinjam, tetapi terbatas untuk anggota koperasi saja dan tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan bendahara pengurus KSU Mitra Sejahtera selaku penanggungjawab bidang keuangan, diketahui bahwa koperasi ini telah berbadan hukum dan sudah memiliki anggota aktif sekitar 77 orang. KSU Mitra Sejahtera merupakan sebuah koperasi usaha dibawah naungan sekolah dengan modal sendiri dari yayasan dan para anggota. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, koperasi perlu mencatat dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud dari pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada para anggotanya. Laporan keuangan yang baik ialah yang mudah dipahami dan disusun berdasarkan standar yang berlaku (Mutammimah dkk., 2019). Namun, fenomena riset pada KSU tersebut tidak demikian. Terbukti dalam pencatatan keuangan yang dibuat oleh KSU Mitra Sejahtera saat ini masih sangat sederhana hanya bentuk catatan keluar dan masuknya uang saja tanpa acuan yang jelas. Pihak pengurus koperasi mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan latar belakang SDM yang bukan berasal dari pendidikan akuntansi, sehingga mengakibatkan koperasi tersebut selama dua hingga tiga tahun ini tidak dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, salah satu penyebab pihak koperasi tidak dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar yakni kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM terkait pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar bagi suatu entitas.

Melihat uraian tersebut, peneliti menganalisis bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada KSU Mitra Sejahtera, mengingat koperasi tersebut termasuk ke dalam entitas yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang harus dilaksanakan setiap satu periode karena wujud dari pertanggungjawaban koperasi kepada para anggota atas kinerjanya. Maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Penyusunan Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera SMPIT Al Qhozali Jember Berbasis SAK ETAP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP yang dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera SMPIT Al Qhozali Jember?
2. Bagaimana penyajian pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP yang dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera SMPIT Al Qhozali Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah ditentukan diatas, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengimplementasikan mekanisme penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP pada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera SMPIT Al Qhozali Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP pada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera SMPIT Al Qhozali Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak terkait diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu SAK ETAP pada sebuah entitas termasuk koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Entitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi koperasi, sehingga kedepannya pengurus koperasi dapat secara mandiri menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu SAK ETAP, dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam satu periode, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi dalam mengambil keputusan kedepannya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh peneliti selama di bangku perkuliahan serta dapat memperkaya ilmu peneliti tentang mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Sekaligus sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Bagi Akademis dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan teori pembelajaran dan pengetahuan tambahan di bidang Akuntansi, serta sebagai sumber rujukan bagi semua pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik serupa.

